

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TANAH DATAR

MERI KURNIA SARI¹, ANDRIA NINGSIH^{2*}

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi^{1,2}

email: merikurniasari451@gmail.com¹, andrianingsih56@gmail.com^{2*}

Corresponding Author: andrianingsih56@gmail.com^{2*}

Abstract: *The performance of government officials is one of the key indicators in achieving effective, efficient, transparent, and accountable governance. In regional government agencies responsible for public services, law enforcement, public order, community protection, and fire management, such as the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP) and the Fire and Rescue Department (Damkar) of Tanah Datar Regency, improving officials' performance is essential and must be supported by high-quality regional financial management. Performance-based budgeting and the effectiveness of the internal control system are considered two important factors influencing the performance of government officials. Performance-based budgeting emphasizes the achievement of outputs and outcomes, while the internal control system ensures that organizational activities are carried out effectively, efficiently, in compliance with applicable regulations, and with minimal risk of irregularities. This study aims to examine the effect of performance-based budgeting and the effectiveness of the internal control system on the performance of government officials at the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and Fire and Rescue Department (Damkar) of Tanah Datar Regency. This study employed a quantitative approach using a survey method by distributing questionnaires to all 40 government officials as respondents. A saturated sampling technique was applied, in which the entire population was included as the research sample. Data were analyzed using SmartPLS version 4 through measurement model (outer model), structural model (inner model), and hypothesis testing. The results indicate that performance-based budgeting has a positive and significant effect on the performance of government officials. In addition, the effectiveness of the internal control system also has a positive and significant effect on the performance of government officials. These findings suggest that better implementation of performance-based budgeting and more effective internal control systems contribute to improving the performance of government officials at the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and Fire and Rescue Department (Damkar) of Tanah Datar Regency.*

Keywords: *Performance-Based Budgeting, Internal Control System, Government Officials' Performance*

Abstrak: Kinerja aparatur pemerintah merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pada organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat, serta penanggulangan kebakaran, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar), peningkatan kinerja aparatur menjadi tuntutan yang harus didukung oleh pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan efektivitas sistem pengendalian internal merupakan dua faktor yang diyakini berperan dalam meningkatkan kinerja aparatur. Anggaran berbasis kinerja berorientasi pada pencapaian output dan outcome, sedangkan sistem pengendalian internal berfungsi memastikan seluruh aktivitas organisasi terlaksana secara efektif, efisien, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mampu meminimalkan risiko penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh aparatur yang berjumlah 40 orang sebagai responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan SmartPLS versi 4 melalui pengujian model pengukuran (*outer model*), model struktural (*inner model*), dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Selain itu, efektivitas sistem pengendalian internal juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Temuan ini

mengindikasikan bahwa semakin optimal penerapan anggaran berbasis kinerja dan semakin efektif sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi pula kinerja aparatur pemerintah pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar.

Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja Aparatur Pemerintah,

A. Pendahuluan

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan salah satu agenda utama reformasi birokrasi di Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu bentuk implementasinya adalah penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu sistem penganggaran yang mengaitkan alokasi anggaran dengan pencapaian target kinerja organisasi. Melalui pendekatan ini, keberhasilan suatu instansi tidak lagi diukur berdasarkan besarnya anggaran yang terserap, tetapi lebih menitikberatkan pada hasil yang dicapai dalam bentuk output dan outcome yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengharuskan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, 2003). Menurut (Mardiasmo, 2018), penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola sektor publik yang akuntabel karena setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan melalui capaian kinerja yang terukur.

Dalam lingkungan pemerintah daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem tersebut mendorong setiap organisasi perangkat daerah untuk merencanakan program berdasarkan sasaran yang jelas, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan kinerja organisasi yang lebih optimal. (Nordiawan et al., 2019) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang berbasis kinerja mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Senada dengan itu, (Bastian, 2017) menyatakan bahwa sistem penganggaran yang berorientasi pada hasil memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas organisasi sektor publik melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien.

Salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Tanah Datar. Instansi ini berperan dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta melaksanakan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Karakteristik tugas tersebut menuntut aparatur memiliki profesionalisme, kedisiplinan, kemampuan koordinasi, dan kesiapsiagaan yang tinggi. Kondisi tersebut juga membutuhkan dukungan pengelolaan anggaran yang efektif agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengelola anggaran tersebut secara berorientasi pada kinerja.

Selain penerapan anggaran berbasis kinerja, keberhasilan organisasi sektor publik juga dipengaruhi oleh efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan mekanisme pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). (Wibowo, 2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian yang berjalan secara efektif mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan karena setiap aktivitas organisasi dilaksanakan sesuai prosedur, meminimalkan risiko penyimpangan, dan memperkuat proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, efektivitas pengendalian internal menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah.

Secara empiris, hubungan antara anggaran berbasis kinerja, sistem pengendalian internal, dan kinerja aparatur telah banyak diteliti. (Fathony et al., 2023) menemukan bahwa penerapan anggaran

berbasis kinerja dan efektivitas pengendalian keuangan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah. Penelitian (Evaranus & Wahidahwati, 2020) juga menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja bersama pengendalian internal mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan akuntabel. Sementara itu, (Handayani & Ridwan, 2024) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh temuan (Saptarinur et al., 2022) yang menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja yang didukung sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi yang baik mampu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi sektor publik.

Meskipun demikian, kondisi empiris pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kinerja aparatur. Berdasarkan hasil observasi awal, masih dijumpai keterlambatan penyelesaian beberapa program kerja, belum optimalnya pencapaian indikator kinerja pada sejumlah kegiatan, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan tugas operasional, serta perlunya penguatan fungsi pengawasan internal agar pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efektif dan akuntabel. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja aparatur tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut dikelola serta bagaimana sistem pengendalian internal diterapkan secara konsisten dalam organisasi.

Penelitian mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja dan efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kinerja aparatur telah banyak dilakukan pada pemerintah daerah, badan pengelola keuangan daerah, maupun organisasi perangkat daerah lainnya. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kedua variabel tersebut pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar masih sangat terbatas. Perbedaan karakteristik tugas, lingkungan kerja, serta tanggung jawab organisasi menyebabkan hasil penelitian sebelumnya belum tentu dapat digeneralisasikan pada instansi ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, efektivitas pengendalian internal, dan kinerja aparatur

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen, yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja dan efektivitas sistem pengendalian internal, terhadap variabel dependen, yaitu kinerja aparatur pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan pengujian hipotesis secara objektif melalui pengolahan data numerik menggunakan teknik analisis statistik sehingga hubungan antarvariabel dapat dijelaskan secara empiris (Sugiyono, 2022).

Penelitian dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Tanah Datar. Populasi penelitian mencakup seluruh aparatur yang bekerja pada instansi tersebut dengan jumlah 119 orang. Mengingat tidak seluruh anggota populasi memenuhi karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian, maka teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling. Teknik ini dipilih karena memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menentukan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022). Adapun kriteria yang digunakan meliputi aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, memiliki masa kerja minimal satu tahun, serta bersedia menjadi responden penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 40 responden.

Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel yang diperoleh dari kajian teori dan penelitian terdahulu. Pengukuran setiap indikator menggunakan skala Likert lima tingkat, dengan rentang skor 1 menunjukkan sangat tidak

setuju hingga skor 5 menunjukkan sangat setuju. Penggunaan skala Likert bertujuan untuk mengukur tingkat persepsi responden terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kinerja aparatur secara kuantitatif.

Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Metode SEM-PLS dipilih karena mampu menguji hubungan antarvariabel laten secara simultan, baik pada model pengukuran (measurement model) maupun model struktural (structural model). Selain itu, metode ini sesuai digunakan pada penelitian yang memiliki ukuran sampel relatif kecil, tidak mengharuskan data berdistribusi normal, serta memiliki kemampuan prediksi yang baik (Ghozali & Latan, 2020).

Tahapan analisis diawali dengan melakukan evaluasi terhadap model pengukuran (outer model).

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara valid dan reliabel. Validitas konvergen dievaluasi menggunakan nilai outer loading, dengan kriteria minimal 0,70, serta nilai Average Variance Extracted (AVE) yang harus melebihi 0,50. Selanjutnya, validitas diskriminan dianalisis menggunakan kriteria Fornell-Larcker dan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT). Reliabilitas konstruk dinilai melalui Cronbach's Alpha dan Composite Reliability, yang masing-masing diharapkan memiliki nilai di atas 0,70 (Ghozali & Latan, 2020).

Setelah model pengukuran memenuhi seluruh persyaratan, analisis dilanjutkan pada model struktural (inner model). Evaluasi dilakukan dengan mengamati nilai koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Selain itu, dilakukan pengujian Effect Size (f^2) dan Predictive Relevance (Q^2) guna menilai kekuatan pengaruh antarvariabel serta kemampuan prediksi model. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur Bootstrapping pada SmartPLS dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai t-statistic lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel yang diuji (Ghozali & Latan, 2020).

C. Pembahasan dan Analisa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 40 orang responden yang dipilih dari total populasi sebanyak 119 aparatur. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan SmartPLS versi 4 melalui pengujian outer model, inner model, dan uji hipotesis.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu mengukur konstruk penelitian secara valid dan reliabel. Pengujian meliputi validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk sebelum analisis model struktural dilakukan.

1. Uji Validitas Konvergen

Validitas konvergen dievaluasi melalui nilai outer loading masing-masing indikator. Suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai loading factor lebih besar dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2020).

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Loading Factor
Anggaran Berbasis Kinerja	X1.1	0,812
	X1.2	0,834
	X1.3	0,798
	X1.4	0,851
Sistem Pengendalian Internal	X2.1	0,805
	X2.2	0,827

	X2.3	0,844
	X2.4	0,816
Kinerja Aparatur	Y1.1	0,819
	Y1.2	0,853
	Y1.3	0,808
	Y1.4	0,867

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS 4, seluruh indikator pada variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, dan Kinerja Aparatur memiliki nilai outer loading di atas 0,70. Temuan tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk yang diukur sehingga seluruh indikator dinyatakan memenuhi persyaratan validitas konvergen dan layak digunakan pada tahap analisis berikutnya.

2. Hasil Average Variance Extracted (AVE)

Selain menggunakan nilai loading factor, validitas konstruk juga dievaluasi melalui nilai Average Variance Extracted (AVE). Konstruk dinyatakan memenuhi validitas apabila memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50.

Tabel 2. Hasil Uji AVE

Variabel	AVE	Keterangan
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	0,675	Valid
Efektivitas SPI	0,668	Valid
Kinerja Aparatur	0,694	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2026

Nilai AVE pada variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 0,675, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,668, sedangkan Kinerja Aparatur memperoleh nilai 0,694. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas minimum yang direkomendasikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh varians indikator yang dimilikinya. Dengan demikian, model penelitian telah memenuhi persyaratan validitas konstruk.

3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas konstruk bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi indikator dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	0,829	0,891	Reliabel
Efektivitas SPI	0,821	0,887	Reliabel
Kinerja Aparatur	0,846	0,899	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2026

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik sehingga layak digunakan dalam pengujian model struktural.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 4. Nilai R^2

Variabel Endogen	R^2	Keterangan
Kinerja Aparatur	0,661	Kuat

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2026

Nilai R^2 sebesar 0,661 menunjukkan bahwa variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama mampu menjelaskan 66,1% variasi Kinerja Aparatur Pemerintah. Sementara itu, 33,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian, seperti kompetensi aparatur, gaya kepemimpinan, motivasi kerja, budaya organisasi, maupun faktor lingkungan kerja.

2. Uji Hipotesis (Path Coefficient)

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur Bootstrapping pada SmartPLS 4. Keputusan penerimaan hipotesis didasarkan pada nilai t-statistic $> 1,96$ dan p-value $< 0,05$.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	t-statistik	p-value	Keputusan
Anggaran Berbasis Kinerja → Kinerja Aparatur	0,432	5,876	0,000	Diterima
Efektivitas SPI → Kinerja Aparatur	0,451	6,214	0,000	Diterima

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja memiliki koefisien jalur sebesar 0,432, nilai t-statistic 5,876, dan p-value 0,000, sehingga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur. Selanjutnya, variabel Efektivitas Sistem Pengendalian Internal memperoleh koefisien jalur sebesar 0,451, nilai t-statistic 6,214, dan p-value 0,000, yang juga menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur

Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi sistem penganggaran yang berorientasi pada hasil, maka semakin tinggi pula kualitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Penerapan anggaran berbasis kinerja memberikan kejelasan mengenai sasaran program, indikator keberhasilan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kondisi tersebut membantu aparatur memahami prioritas pekerjaan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif, efisien, dan terarah. Selain itu, orientasi pada pencapaian output dan outcome mendorong aparatur untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat (Mardiasmo, 2018) yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan instrumen pengelolaan keuangan publik yang mampu meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengukuran capaian kinerja secara terukur. Hasil

penelitian ini juga konsisten dengan penelitian (Fathony et al., 2023) dan (Evaranus & Wahidahwati, 2020) yang membuktikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah.

Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Aparatur

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi pula kualitas pelaksanaan tugas aparatur.

Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan setiap aktivitas organisasi dilaksanakan sesuai prosedur, meminimalkan risiko penyimpangan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pengendalian yang efektif juga memperkuat koordinasi antarunit kerja sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih tepat dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana.

Temuan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menegaskan pentingnya pengendalian internal dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian (Handayani & Ridwan, 2024) serta (Saptarinur et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

D. Penutup

Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi anggaran berbasis kinerja, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penerapan sistem penganggaran yang berorientasi pada pencapaian output dan outcome mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, efektivitas sistem pengendalian internal juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Pengendalian internal yang berjalan secara efektif mampu mendukung terciptanya lingkungan kerja yang tertib, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan, meminimalkan risiko penyimpangan, serta memperbaiki proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Kondisi tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas aparatur sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih efektif. Secara simultan, penerapan anggaran berbasis kinerja dan efektivitas sistem pengendalian internal mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan variasi kinerja aparatur pemerintah pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja aparatur tidak hanya dipengaruhi oleh aspek individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sistem pengelolaan anggaran dan mekanisme pengendalian internal yang diterapkan dalam organisasi.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar agar terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja serta memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan program, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja aparatur, seperti kompetensi sumber daya manusia, motivasi kerja, kepemimpinan, budaya organisasi, atau komitmen organisasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja aparatur pemerintah.

Daftar Pustaka

- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Evaranus, K., & Wahidahwati. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran, dan Pengendalian Internal pada Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu*

- Dan Riset Akuntansi*, 9(10), 1–20.
- Fathony, A. A., Priatna, H., & Susanti, I. (2023). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 14(2), 1–15.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2020). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (Edisi ke-2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, D. S., & Ridwan. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 1–14.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (1st ed.). BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2019). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Saptarinur, R., Rofingatun, S., & Lamba, R. S. A. (2022). Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 17(2), 80–94.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D* (Edisi 2, Cetakan ke-4). Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. (2003).
- Wibowo. (2019). *Manajemen: Dari Fungsi Dasar ke Inovasi* (1st ed.). Rajawali Pers.